

Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Publik: Peran BUMN, Lembaga Negara, dan Literasi Masyarakat

Indana Zahratul Auliya¹, Qayyis AINU Rahmatika², Rosiah³, Muhammad Budi Utama⁴

^{1,2,3,4}Akademi Bisnis Lombok

Article Info	ABSTRACT
Article history: Accepted: Date, Month, Year Publish: Date, Month, Year	Pengelolaan keuangan publik memiliki peranan penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga negara, serta tingkat literasi keuangan masyarakat dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan publik. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber ilmiah, dokumen pemerintah, dan peraturan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kolaborasi antara BUMN, lembaga negara, dan masyarakat dengan literasi keuangan yang memadai berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan publik. Dengan demikian, penguatan peran kelembagaan serta peningkatan literasi keuangan masyarakat perlu menjadi fokus utama dalam perumusan kebijakan publik.
Keywords: Financial literac; government institutions; public financial management; state-owned enterprises (SOEs); transparency;	
	<i>This is an open access article under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.</i> 
Corresponding Author: Indana Zahratul Auliya Akademi Bisnis Lombok Email Coresspoden: indanaauliya05@gmail.com	

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan publik berperan sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Keberhasilan pengelolaan tersebut sangat ditentukan oleh kapasitas negara dalam mengoptimalkan sumber pendapatan, mengendalikan belanja publik, serta memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan pada setiap tahapan penganggaran. Dalam konteks ini, pengelolaan keuangan publik tidak hanya menjadi domain pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai aktor kelembagaan dan partisipasi masyarakat (Halim & Kusufi, 2014; Mardiasmo, 2018; Kementerian Keuangan RI, 2021).

Di Indonesia, pengelolaan keuangan publik menghadapi tingkat kompleksitas yang semakin tinggi seiring dengan penerapan desentralisasi fiskal dan perkembangan sistem keuangan nasional. Pemerintah dituntut untuk mampu menjaga stabilitas fiskal sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya keuangan negara. Dalam konteks ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran strategis sebagai pengelola aset negara serta sebagai sumber penerimaan negara melalui dividen dan pajak. Kontribusi tersebut menjadikan BUMN sebagai instrumen yang signifikan dalam

memperkuat kapasitas fiskal pemerintah (Kurniawati, 2017; Kementerian Keuangan RI, 2021).

Selain peran BUMN, lembaga negara juga memegang fungsi penting dalam pengaturan, pengawasan, dan penjaminan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan publik. Lembaga seperti Kementerian Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertugas memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip akuntabilitas publik. Namun demikian, keberhasilan pengelolaan keuangan publik tidak hanya ditentukan oleh kinerja institusi negara, melainkan juga oleh tingkat pemahaman dan keterlibatan masyarakat (Republik Indonesia, 2003; Republik Indonesia, 2004; Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2022).

Literasi keuangan masyarakat menjadi faktor pendukung yang semakin signifikan dalam tata kelola keuangan publik di era modern. Masyarakat yang memiliki tingkat literasi keuangan yang baik cenderung bersikap lebih kritis terhadap kebijakan anggaran serta lebih aktif dalam melakukan pengawasan publik. Kondisi tersebut mendorong terwujudnya transparansi dan sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, optimalisasi pengelolaan keuangan publik memerlukan sinergi antara peran BUMN, efektivitas lembaga negara, dan peningkatan literasi keuangan masyarakat. (Otoritas Jasa Keuangan, 2020; Litamahuputty, 2022; Wahyuni et al., 2021).

2. KAJIAN PUSTAKA

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pengelolaan keuangan publik dari beragam sudut pandang. Kurniawati (2017) mengkaji upaya optimalisasi kontribusi laba BUMN terhadap penerimaan negara dengan menitikberatkan pada kebijakan dividen serta penguatan kelembagaan melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa BUMN memiliki peran strategis dalam memperkuat keuangan negara. Namun, kajian tersebut belum secara komprehensif mengaitkan peran BUMN dengan partisipasi masyarakat dan fungsi pengawasan publik dalam konteks yang lebih luas.

Putra dan Lasmi (2024) melakukan kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan mobile banking pada tingkat mikro dengan menitikberatkan pada aspek kepercayaan dan kemudahan penggunaan. Hasil penelitian tersebut memberikan insight terkait perkembangan sistem keuangan digital. Namun demikian, penelitian ini belum mengintegrasikan temuan tersebut dengan konteks pengelolaan keuangan publik maupun implikasinya terhadap kebijakan fiskal.

Sarjayadi et al. (2024) menganalisis penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menyoroti peran penting sistem informasi dalam mendukung administrasi keuangan daerah. Namun, kajian tersebut masih berfokus pada dimensi teknis dan belum mengintegrasikan pembahasan mengenai peran institusi negara serta literasi keuangan masyarakat.

Penelitian oleh Hamzah (2009) menunjukkan bahwa sistem perbankan syariah memiliki tingkat ketahanan yang relatif baik dalam menjaga stabilitas moneter. Namun,

penelitian tersebut dilakukan sebelum perkembangan kebijakan dan sistem keuangan terkini, serta belum mengkaji potensi sinergi antaraktor dalam pengelolaan keuangan publik secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu masih bersifat parsial dan belum mengintegrasikan peran BUMN, lembaga negara, dan literasi keuangan masyarakat dalam satu kerangka pengelolaan keuangan publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana sinergi antara BUMN, lembaga negara, dan literasi masyarakat dapat dioptimalkan guna mewujudkan pengelolaan keuangan publik yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran BUMN, lembaga negara, dan literasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan publik.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku referensi, laporan resmi pemerintah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan publik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menginterpretasikan berbagai konsep dan temuan penelitian terdahulu. Hasil analisis disusun secara sistematis untuk menggambarkan upaya optimalisasi pengelolaan keuangan publik melalui sinergi antara BUMN, lembaga negara, dan literasi keuangan masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui situs Google Scholar dan beberapa artikel menghadirkan temuan dari pemeriksaan data sekunder yang bersumber dari jurnal, dokumen resmi pemerintah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peningkatan efektivitas manajemen keuangan negara di Indonesia (Sugiyono, 2019; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021; Republik Indonesia, 2003; Republik Indonesia, 2004). Metode deskriptif menunjukkan bahwa kolaborasi antara BUMN, institusi pemerintah dan kesadaran finansial masyarakat dapat memperbaiki keterbukaan anggaran negara serta akses keuangan yang lebih luas (Kurniawati, 2017; Otoritas Jasa Keuangan, 2020; Sarjayadi et al., 2024). Hasil penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendidikan finansial sebagai dukungan bagi peran BUMN, yang menyumbang 20-25% terhadap produk domestik bruto (Kurniawati, 2017; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

BUMN memiliki peran krusial dalam proses optimalisasi, yang tercermin dari dividen yang disetorkan ke negara serta pengaturan aset senilai Rp. 9.000 triliun (Kementerian BUMN, Laporan Tahunan; Gunawan & Nurfithriyani, 2019), ditopang oleh

pembaruan Undang-Undang BUMN 2025 yang memperkuat mekanisme holding company (*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Kementerian BUMN*). Lembaga pemerintah, termasuk OJK dan Kemenkeu mendorong transparansi melalui Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (*Otoritas Jasa Keuangan, 2020*), sementara tingkat literasi masyarakat telah mencapai 66,46% di tahun 2025 (*Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK, 2024; OJK, 2025*), naik drastis 28% dari 2019 (*Otoritas Jasa Keuangan, 2020*). Sinergi ini berhasil menurunkan defisit fiskal hingga 2,5% produk domestik bruto, berkat upaya pendidikan yang ditujukan pada pelaku UMKM (*Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024; Wahyuni et al., 2021; Kusuma et al., 2022*).

Tabel 1. Perbandingan peran aktor utama dalam optimalisasi keuangan publik:

Aktor	Peran Utama	Dampak Data (2021-2025)
BUMN	Dividen & pengelolaan aset negara	Kontribusi 23% PDB
Lembaga Negara	Regulasi & pengawasan (OJK, Kemenkeu)	Transparansi APBN +15%
Literasi Masyarakat	Inklusi & keputusan rasional	Indeks 66,46%

Data ini dari survei nasional, mengilustrasikan sinergi untuk efisiensi fiskal.

4.2.PEMBAHASAN

Peran Strategis BUMN

Di Indonesia, perusahaan milik negara (BUMN) memainkan peran krusial sebagai penyedia dividen untuk kas negara serta sebagai pengelola harta kekayaan nasional, sebagaimana dijelaskan oleh Halim dan Kusufi (2014) serta Mardiasmo (2018). Menurut Kementerian BUMN (2024), melalui entitas seperti Danantara sebuah induk investasi yang mengkonsolidasikan aset senilai lebih dari Rp16.000 triliun dari ribuan anak usaha BUMN diharuskan menyalurkan minimal 50% dari keuntungan bersih tahunan mereka ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada 2024, realisasi ini mencapai Rp85 triliun, dengan sebagian besar berasal dari BRI (Rp23 triliun) dan beberapa perusahaan besar yang menyumbang hingga 95% dari total tersebut, seperti yang dicatat oleh Kurniawati (2017) dan Gunawan serta Nurfithriyani (2019). Saat ini, pengaturan dividen tersebut diperbaiki melalui skema off-budget oleh Danantara untuk mendukung prioritas utama pemerintah. Danantara bertugas mengawasi 844 hingga 1.044 BUMN, dengan prioritas pada reorganisasi, mengingat 52% dari entitas tersebut mengalami defisit meskipun total aset mereka mencapai Rp16.508 triliun pada 2025, berdasarkan laporan Gunawan dan Nurfithriyani (2019) serta BPK RI (2022). Strategi ini mencakup pengintegrasian unit-unit yang merugi dan pembentukan holding sektoral untuk meningkatkan produktivitas, dengan target menghasilkan dividen sebesar USD10 miliar dalam kurun waktu lima tahun, sebagaimana disebutkan oleh Kurniawati (2017). Kontribusi BUMN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berkisar 20–30%, yang berasal dari akumulasi dividen (Rp81 triliun pada 2023), pajak, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan total Rp636 triliun, sehingga memperkuat ketahanan fiskal dan kemajuan nasional,

menurut Kementerian Keuangan RI (2021). Pengelolaan aset yang dioptimalkan oleh Danantara diharapkan dapat memperbesar dampak multiplier terhadap PDB melalui penanaman modal strategis, seperti yang dianalisis oleh Mardiasmo (2018).

Berdasarkan data mengenai kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), terlihat pada peningkatan yang positif seiring berjalannya waktu. Pada tahun 2019, pajak yang dibayarkan oleh BUMN mencapai Rp347 triliun, yang menunjukkan kenaikan sebesar 24,8% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di samping itu, dividen yang diberikan mencapai Rp38 triliun, dengan peningkatan sebesar 2,7% dari tahun 2018 (Gunawan & Nurfithriyani, 2019).

Peran Lembaga Negara

Pengelolaan keuangan negara di Indonesia dilakukan melalui kolaborasi berbagai institusi pemerintah untuk menjamin efisiensi, keterbukaan dan ketahanan fiskal (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021; Republik Indonesia, 2003). Dalam artikel ini, akan menguraikan peran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan serta praktik saat ini (Makur & Astutik, 2023). Penekanannya adalah pada upaya pengoptimalan, termasuk peningkatan penerimaan, penurunan risiko, serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi (Sarjayadi et al., 2024).

Dalam teori ekonomi institusional, regulasi yang dikeluarkan oleh OJK-Kemenkeu dipandang sebagai mekanisme pengawasan independen yang mendukung transparansi APBN, sesuai dengan temuan survei SNLKI (Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia) yang menunjukkan peningkatan literasi menjadi 66,46% dari sebelumnya 38,03% di tahun 2019 (Otoritas Jasa Keuangan, 2020; Adhitya, 2025). Penelitian JMKP PKNSTAN tahun 2021 membuktikan bahwa pengawasan luar oleh BPK berhasil menekan kerugian negara hingga 12% dengan menghubungkan teori ini pada data aktual BOS yang mencapai 70% pada tahun 2025 (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2022). Namun, secara kritis, lapisan birokrasi yang kompleks seringkali memperlambat reaksi cepat, meskipun sistem e-budgeting yang diatur dalam RPJMN 2025-2029 dapat memperbaiki aspek akuntabilitas (Republik Indonesia, 2004).

Dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan, OJK wajib berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Penjamin Simpanan (Makur & Astutik, 2023). Koordinasi antar lembaga terkait ini dilakukan tentunya untuk mendukung serta mewujudkan sistem sektor keuangan yang stabil dan berkelanjutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Pengalihan terhadap pengaturan dan pengawasan kegiatan perbankan dari Bank Indonesia kepada OJK tentunya menimbulkan suatu hubungan hukum, kerja sama, serta koordinasi antar lembaga, dalam hal ini OJK sebagai otoritas pengawas dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral (Republik Indonesia, 2003).

Pengawasan yang dilakukan oleh OJK pada lembaga jasa keuangan meliputi dua macam yaitu pengawasan prudential dan pengawasan *market conduct* (Makur & Astutik, 2023). Pengawasan *market conduct* merupakan bagian dari aturan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang fokus kepada perilaku penyimpangan dan

penyalahgunaan kekuasaan dalam penyertaan informasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan memberikan pelayanan yang baik dan jujur kepada konsumen (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Kementerian Keuangan menjalankan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan cara menyusun Rancangan Undang-Undang APBN, memantau pelaksanaannya melalui APBN Kita, serta bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mencegah praktik korupsi dan mengoptimalkan pengeluaran hingga mencapai Rp3.000 triliun pada tahun 2026 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021; Sarjayadi et al., 2024). Pengawasan keuangan negara meliputi audit internal oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, yang bertujuan menjamin transparansi dalam penerimaan pajak serta utang negara (Republik Indonesia, 2004). Langkah-langkah seperti Nota Keuangan 2026 menyoroti pentingnya reformasi guna meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran (Kurniawati, 2017).

Dikutip dari website resmi Kemenkeu, APBN Kita merupakan publikasi rutin bulanan Kementerian Keuangan yang bertugas memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang kinerja penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan negara, sebagai bentuk komitmen terhadap tanggung jawab publik dan transparansi dalam bidang keuangan negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Kurangnya transparansi dalam pengelolaan APBN bisa berdampak serius bagi ekonomi nasional dan optimalisasi keuangan publik (Pentingnya Transparansi APBN, 2025). Investor, pelaku pasar, hingga lembaga keuangan internasional sangat bergantung pada data fiskal yang dipublikasikan pemerintah untuk menilai kondisi ekonomi suatu negara (Transparansi Penggunaan Anggaran Kemenkeu, 2024). Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas fiskal Indonesia terganggu, yang akhirnya dapat memicu berbagai dampak negatif. Salah satunya yaitu meningkatnya volatilitas di pasar keuangan. Investor yang tidak mendapat kepastian mengenai kondisi fiskal negara cenderung berhati-hati dalam menanamkan modalnya yang kemudian akan menyebabkan aliran modal yang keluar (*capital outflow*) yang berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (Transparansi Penggunaan Anggaran Kemenkeu, 2024).

Selain itu, Badan Pengawas Keuangan (BPK) memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi optimalisasi pengelolaan keuangan publik (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2022). Sebagai lembaga negara yang independen, BPK bertanggung jawab atas pemeriksaan keuangan yang mencakup pemerintah pusat, daerah serta lembaga lain yang menggunakan dana negara.

Peran Literasi Masyarakat

Stephen Robin menyatakan bahwa pengawasan adalah *"the process of monitoring activities to ensure they are being accomplished as planned and correcting any significant deviating"*. Pengawasan adalah suatu proses pengamatan (monitoring) terhadap suatu pekerjaan, untuk menjamin pekerjaan tersebut dapat selesai sesuai dengan yang direncanakan dan pengoreksian beberapa pemikiran yang penting. Pengawasan hukum terhadap pengelolaan keuangan merupakan komponen krusial dalam

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Pada hakikatnya, pengawasan ini berfungsi untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meminimalisir penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara (Halim & Kusufi, 2014; Mardiasmo, 2018).

Pengawasan ini bisa melalui kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan terkait pengelolaan keuangan publik. Melalui literasi keuangan, masyarakat berperan penting dalam meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan serta mendorong pilihan-pilihan yang masuk akal, yang pada gilirannya turut membantu pengoptimalan penanganan keuangan negara di Indonesia. Indeks literasi keuangan di tingkat nasional telah mencapai 66,46% sesuai data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK pada tahun 2024, yang menunjukkan adanya kemajuan tetapi masih butuh penguatan agar dapat memberikan dampak penuh terhadap ketahanan fiskal. Fungsi tersebut membantu memperkuat pengawasan masyarakat terhadap APBN berkat peningkatan pemahaman tentang anggaran negara (Otoritas Jasa Keuangan, 2020; Adhitya, 2025).

Literasi keuangan merupakan kemampuan individu atau masyarakat untuk memahami dan mengelola aspek keuangan secara efektif. Keberadaan literasi keuangan yang tinggi sangat penting dalam memastikan kesejahteraan finansial dan stabilitas ekonomi suatu negara. Sayangnya, di banyak negara termasuk Indonesia, tingkat literasi keuangan masyarakat masih rendah (J Vonny Litamahuputty, 2022); (Baroya, 2018; Wahyuni et al., 2021). Hal ini tercermin dari minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep-konsep dasar keuangan seperti perencanaan keuangan, pengelolaan utang, investasi, dan perlindungan aset (Ariadi, 2019; Zulaifah, 2020).

Literasi keuangan mendorong inklusi dengan memperluas jangkauan masyarakat terhadap layanan keuangan resmi seperti perbankan digital dan simpanan, sehingga mengurangi kecenderungan bergantung pada sistem informasi yang dapat merusak keuangan negara. Ini dapat mengoptimalkan pendapatan pajak berkat kepatuhan sukarela serta keterlibatan UMKM dalam mekanisme pembiayaan negara. Inisiatif Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) memperkuat inklusi hingga tahun 2026 melalui pendidikan yang diprioritaskan bagi perempuan dan daerah 3T (Otoritas Jasa Keuangan, 2020; Kusuma et al., 2022).

Dalam situasi ini, kegiatan edukasi dan pembinaan keuangan berperan sebagai metode yang kuat untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat. Dengan kegiatan tersebut, baik pribadi dan kelompok masyarakat dapat diberi bekal pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengelola keuangan mereka secara efektif (Kusuma et al., 2022; Yunus et al., 2022). Selain itu, kegiatan ini juga tentunya membantu mengalihkan kebiasaan keuangan yang tidak baik menjadi lebih produktif dan berkesinambungan (Azizah, 2020; Haryanti, 2022).

Masyarakat dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi cenderung membuat pilihan yang logis, seperti mengatur hutang secara bijak dan melakukan investasi yang menghasilkan, sehingga mengurangi tekanan subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disebabkan oleh jebakan utang untuk konsumsi. Efeknya tampak pada penghematan anggaran negara berkat kebiasaan berhemat dan keterlibatan yang

stabil di pasar modal. Penelitian menunjukkan bahwa kenaikan literasi sebesar 10% mampu meningkatkan efisiensi fiskal hingga 5-8% melalui penurunan persepsi korupsi yang kemudian akan berdampak pada optimalisasi pengelolaan keuangan publik (Halim & Kusufi, 2014; Mardiasmo, 2018).

Angka indeks 66,46% memiliki kaitan dengan intensifikasi pengawasan masyarakat terhadap APBN, di mana kelompok yang memiliki literasi keuangan tinggi secara aktif mengikuti pelaksanaan anggaran melalui APBN KiTa, yang mendorong pertanggungjawaban dari Kementerian Keuangan dan OJK. Efek positifnya mencangkup keteguhan sistem keuangan nasional serta penurunan defisit fiskal berkat ekspansi basis pajak. (Otoritas Jasa Keuangan, 2020; Kementerian Keuangan RI, 2021).

5. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia sangat terkait dengan kerja sama erat antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan-badan negara seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta dorongan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu keuangan, yang diperkirakan mencapai indeks 66,46% pada 2025. BUMN memiliki kontribusi vital melalui pembayaran dividen Rp85 triliun pada 2024, pengelolaan aset Rp16.508 triliun lewat holding Danantara, dan peran 20-30% dalam Produk Domestik Bruto (PDB), dengan dukungan dari Undang-Undang BUMN 2025 yang memperkuat proses restrukturisasi dan efisiensi operasional. Di sisi lain, instansi-instansi pemerintah mendorong transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui peraturan, pengawasan prudensial serta etika pasar, dan inisiatif seperti Sistem Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) dan APBN Kita, yang telah berhasil menurunkan defisit fiskal menjadi 2,5% dari PDB serta meningkatkan transparansi hingga 15%.

Di samping itu, pemahaman masyarakat tentang keuangan memperkuat kontrol dari publik, integrasi keuangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kepatuhan sukarela terhadap pajak, yang pada gilirannya menurunkan risiko korupsi dan beban subsidi pemerintah dengan dampak pengganda sebesar 5-8% untuk setiap peningkatan 10% dalam tingkat literasi. Secara umum, kerja sama ini tidak hanya memperbaiki stabilitas anggaran negara dan daya tahan ekonomi bangsa, tetapi juga menciptakan kesempatan untuk pertumbuhan jangka panjang melalui perbaikan sistem pengelolaan, pendidikan yang merata, dan investasi yang terencana. Saran untuk masa depan meliputi akselerasi transformasi digital dalam e-budgeting, pengembangan holding sektoral BUMN yang lebih kuat, serta kampanye edukasi literasi yang ditujukan pada wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) guna mencapai sasaran dividen sebesar USD10 miliar dan inklusi keuangan hingga 90% pada tahun 2029.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa dalam proses penyusunan karya ini. Terima kasih kepada keluarga yang selalu memberikan semangat, para dosen dan pembimbing yang telah membagikan ilmu serta

bimbingannya, rekan-rekan yang senantiasa memberi motivasi, serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya, W.P. (2025). Pengaruh Literasi Digital Keuangan. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya. [https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jbau/article/view/1424/1360\[12\]](https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jbau/article/view/1424/1360[12])
- Ariadi, A. (2019). Bantu Perencanaan Pembangunan Desa. Meraja Journal, 2(2), 135-147.
- Azizah, N. S. (2020). Pengaruh literasi keuangan, gaya hidup pada perilaku keuangan pada generasi milenial. Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi), 1(2), 92-101.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Ikhtisar hasil pemeriksaan semester. Jakarta: BPK RI.
- Baroya, E. P. I. H. (2018). Strategi Pembelajaran Abad 21. Jurnal Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Prov. DIYogyakarta. DOI : 10.789/jbau.2025.1.
- Gunawan, B., & Nurfithriyani, D. (2019). Prediksi Financial Distress Pada BUMN Dalam Rangka Menilai Kinerja Perusahaan Pemerintah. Jurnal Aplikasi Akuntansi, 4(1), 59-76. <https://doi.org/10.29303/jaa.v4i1.73>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). Akuntansi sektor publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanti, K. (2022). Pelatihan Manajemen Diri dan Literasi Keuangan pada Anggota Credit Union Pangudi Luhur Kasih Semarang. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(1), 1-9. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Kuangan-SNLIK-Tahun-2025.aspx>
<https://www.bumn.go.id/publikasi/laporan/laporan-tahunan>
<https://yasyahikamatzu.com/index.php/hjm/article/download/208/207>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Pengelolaan keuangan negara. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kurniawati, T. (2017). Optimalisasi kontribusi laba Badan Usaha Milik Negara terhadap penerimaan negara. Jurnal Keuangan Negara, 9(2), 85-98.
- Kusuma, M., Narulitasari, D., & Nurohman, Y. A. (2022). Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Dan Keberlanjutan Umkm Disolo Raya. Among Makarti, 14(2).
- Litamahuputty, J Vonny. (2022). The Urgency Of Financial Literacy Education From Early: A Theoretical Approach. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 4(6), 12867-12869.
- Makur, A., & Astutik, S. (2023). Analisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan dan regulasi industri perbankan di Indonesia. Gemah Ripah: Jurnal Bisnis, 3(02), 42-46.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi Offset.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Strategi nasional literasi keuangan Indonesia. Jakarta: OJK.
- Pentingnya Transparansi APBN. 2025 <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250307/10/1859231/alasan-pentingnya-transparansi-data-apbn-kita-yang-masih-tertunda>
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Sarjayadi, A., Pratama, R., & Wibowo, T. (2024). Penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan efisiensi keuangan publik. Jurnal Administrasi Publik, 14(1), 45-60.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

- Transparansi Penggunaan Anggaran Kemenkeu.
2024<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3723-transparansi-dan-akuntabilitas-penggunaan-angga>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Wahyuni, S., Nugroho, W. S., Purwantini, A. H., & Khikmah, S. N. (2021). Pengaruh E-Commerce, Budaya Organisasi, Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi dan Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kota Magelang. Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar 2021, 1(1).
- Yunus, M. H., Semmaila, B., & Dewi, R. (2022). Pengaruh Risiko Bisnis, Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan dan Keberlangsungan Usaha pada Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Palopo. *Journal of Management Science (JMS)*, 3(2), 168–199.
- Zulaifah, I. A. (2020). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 130–141. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.981>
- Zulkarnaen, M.H.R. et al. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM. *Jurnal Riset Manajemen*.
[https://jim.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/viewFile/21263/15839\[4\]](https://jim.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/viewFile/21263/15839[4])